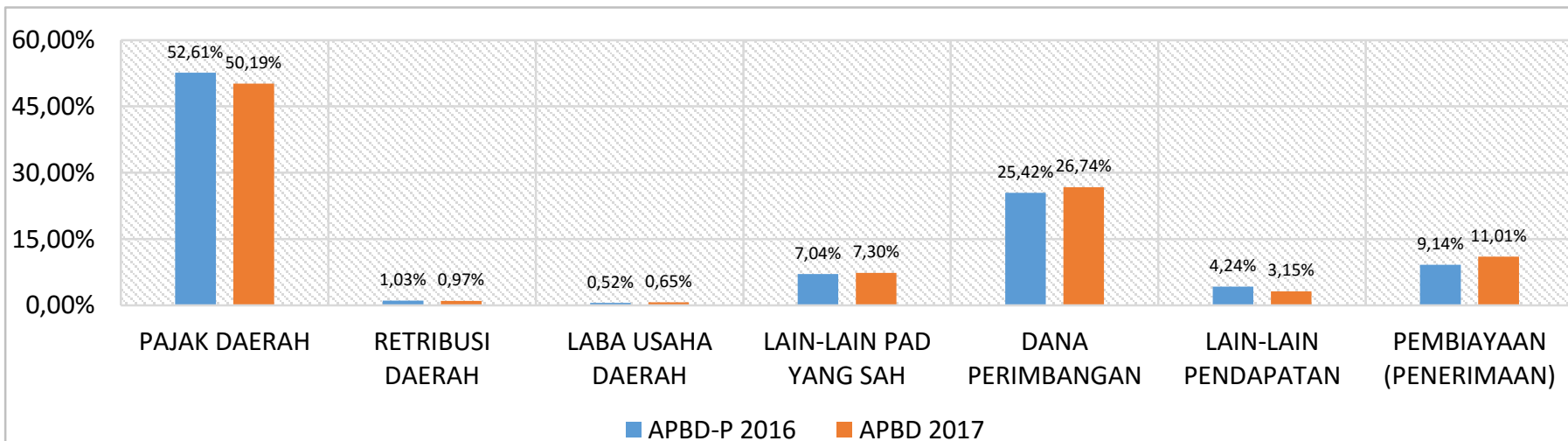


# KONTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP APBD TAHUN 2016 & 2017

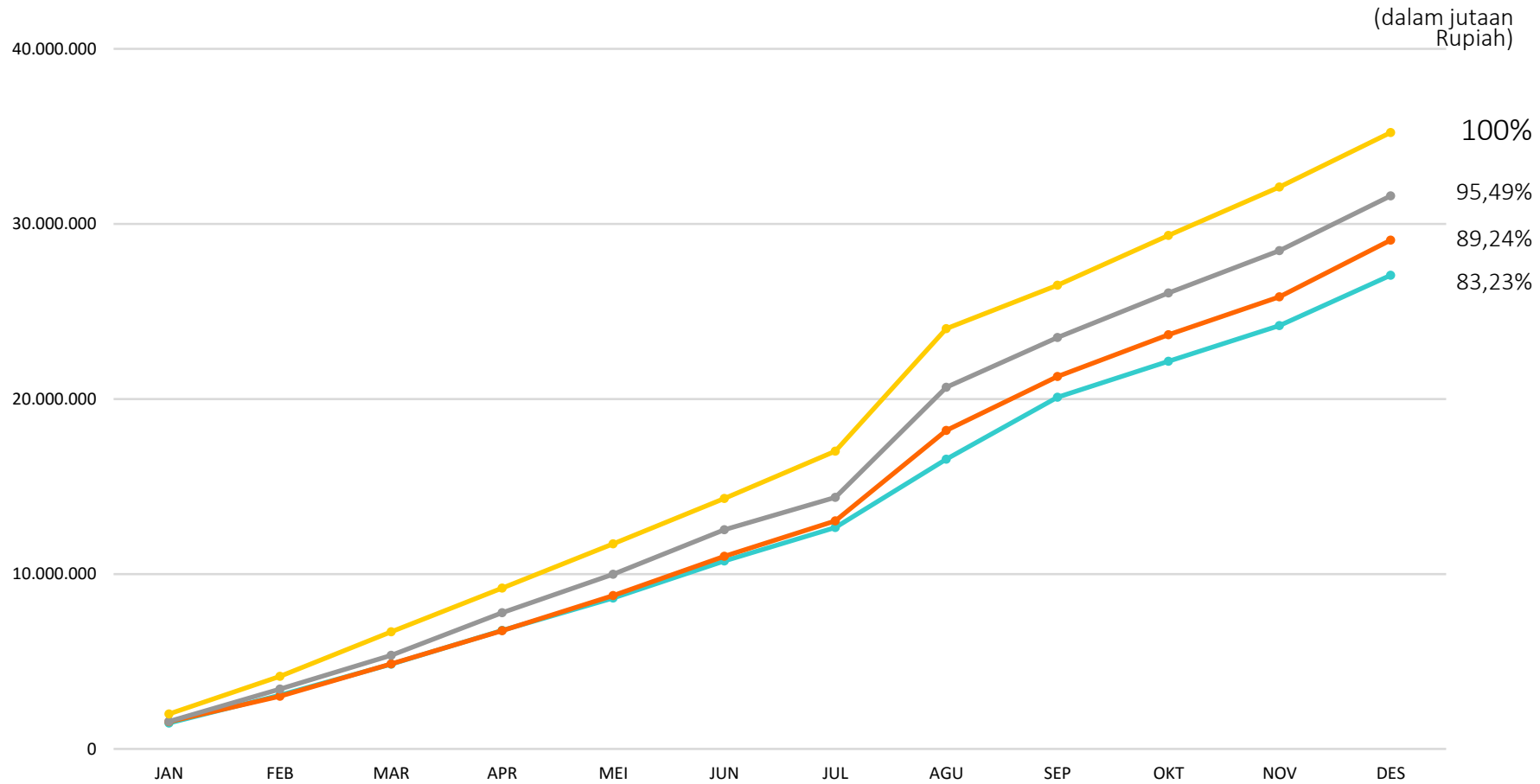
NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN			
		APBD-P 2016		APBD 2017	
		RENCANA	%	RENCANA	%
1	PAJAK DAERAH	33.100.000.000.000	52,61	35.230.000.000.000	50,19
2	RETRIBUSI DAERAH	649.175.000.000	1,03	677.885.370.000	0,97
3	LABA USAHA DAERAH	324.739.130.552	0,52	453.338.246.000	0,65
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	4.427.870.709.186	7,04	5.126.969.754.554	7,30
5	DANA PERIMBANGAN	15.990.368.025.994	25,42	18.770.211.233.000	26,74
6	LAIN-LAIN PENDAPATAN	2.669.095.600.000	4,24	2.207.725.600.000	3,15
7	PEMBIAYAAN (PENERIMAAN)	5.748.789.849.634	9,14	7.725.828.000.000	11,01
<b>JUMLAH APBD</b>		<b>62.910.038.315.366</b>	<b>100,00</b>	<b>70.191.958.203.554</b>	<b>100,00</b>



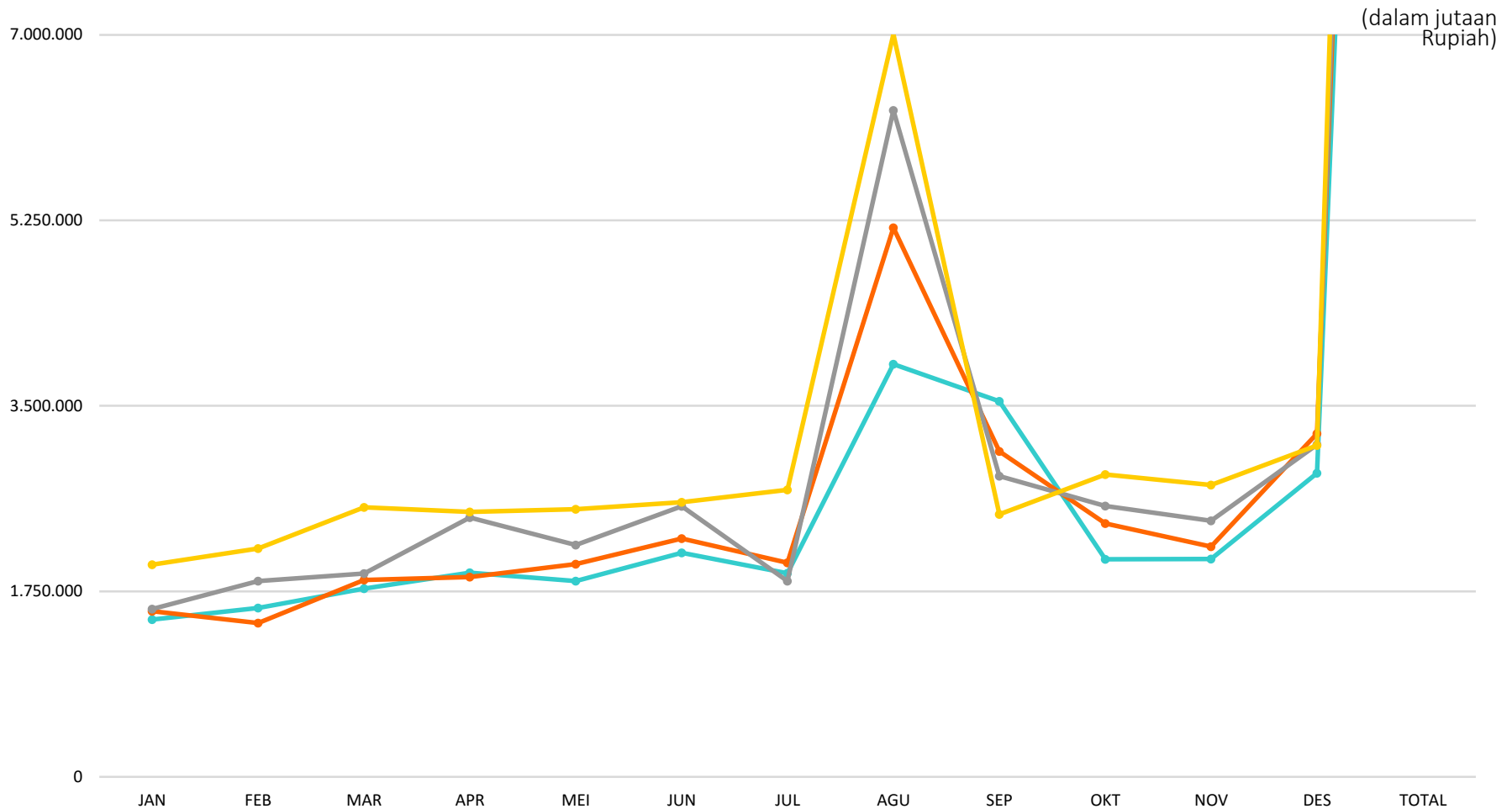
# KONTRIBUSI REALISASI PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH TERHADAP TOTAL PAD TAHUN 2012-2017

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN											
		APBD-P 2012		APBD-P 2013		APBD-P 2014		APBD-P 2015		APBD-P 2016		APBD 2017	
		REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	RENCANA	%
1	PAJAK DAERAH	17.721.493.016.509	80,40	23.370.213.237.450	87,03	27.050.949.023.587	86,50	29.076.926.598.506	86,32	31.608.653.764.012	83,43	35.230.000.000.000	84,92
	- PKB	4.106.968.370.530	18,63	4.605.206.082.027	17,15	4.979.110.607.650	15,92	6.090.200.500.774	18,08	7.143.530.355.999	18,86	7.900.000.000.000	19,04
	- BBN-KB	5.507.710.354.550	24,99	6.143.969.692.650	22,88	5.526.393.737.100	17,67	4.685.403.450.610	13,91	5.003.996.134.800	13,21	5.000.000.000.000	12,05
	- PBB-KB	882.558.921.963	4,00	1.027.108.786.899	3,83	1.170.105.269.170	3,74	1.232.836.931.554	3,66	1.094.901.392.986	2,89	1.100.000.000.000	2,65
	- Pajak Air Tanah	102.046.137.531	0,46	95.346.034.925	0,36	101.880.754.052	0,33	105.115.871.134	0,31	112.399.412.732	0,30	100.000.000.000	0,24
	- Pajak Hotel	1.028.521.564.463	4,67	1.173.799.319.199	4,37	1.384.103.823.437	4,43	1.276.285.658.514	3,79	1.499.798.259.793	3,96	1.630.000.000.000	3,93
	- Pajak Restoran	1.238.573.704.151	5,62	1.552.354.508.716	5,78	1.822.769.015.911	5,83	2.290.255.418.530	6,80	2.453.440.079.189	6,48	2.800.000.000.000	6,75
	- Pajak Hiburan	369.152.834.149	1,67	393.132.154.673	1,46	502.472.929.949	1,61	608.799.682.079	1,81	769.540.465.131	2,03	750.000.000.000	1,81
	- Pajak Reklame	483.178.532.223	2,19	654.644.317.921	2,44	850.675.199.089	2,72	714.967.327.356	2,12	894.271.331.591	2,36	850.000.000.000	2,05
	- PPJ	557.307.626.142	2,53	609.449.433.475	2,27	655.713.255.150	2,10	729.884.587.778	2,17	714.835.029.419	1,89	900.000.000.000	2,17
	- Pajak Parkir	220.901.591.724	1,00	319.317.145.057	1,19	406.919.978.742	1,30	450.941.851.356	1,34	465.990.849.020	1,23	600.000.000.000	1,45
	- BPHTB	3.224.573.379.083	14,63	3.419.932.665.925	12,74	3.700.938.580.712	11,83	3.609.336.161.480	10,71	3.903.782.411.505	10,30	5.300.000.000.000	12,77
	- PBB	-	0,00	3.375.953.095.983	12,57	5.657.137.706.215	18,09	6.807.840.609.166	20,21	7.020.898.907.915	18,53	7.700.000.000.000	18,56
	- Pajak Rokok	-	0,00	-	0,00	292.728.166.410	0,94	475.058.548.175	1,41	531.269.133.932	1,40	600.000.000.000	1,45
2	RETRIBUSI DAERAH	1.820.435.447.667	8,26	333.787.343.513	1,24	515.162.936.406	1,65	459.459.498.063	1,36	674.568.919.886	1,78	677.885.370.000	1,63
3	LABA USAHA DAERAH	351.823.210.569	1,60	397.234.721.942	1,48	465.979.962.538	1,49	527.280.486.037	1,57	289.156.241.449	0,76	453.338.246.000	1,09
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	2.147.049.773.179	9,74	2.750.957.149.731	10,24	3.242.123.963.189	10,37	3.622.510.233.102	10,75	5.314.244.708.047	14,03	5.126.969.754.554	12,36
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>22.040.801.447.924</b>	<b>100,00</b>	<b>26.852.192.452.636</b>	<b>100,00</b>	<b>31.274.215.885.720</b>	<b>100,00</b>	<b>33.686.176.815.708</b>	<b>100,00</b>	<b>37.886.623.633.394</b>	<b>100,00</b>	<b>41.488.193.370.554</b>	<b>100,00</b>

# PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014-2016 dan RENCANA TAHUN 2017



# TREN REALISASI PENCAPAIAN PER BULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014-2016 dan RENCANA TAHUN 2017



# RENCANA PENERIMAAN PAJAK DAERAH RPJMD 2018-2022

NO	JENIS PAJAK	RPJMD					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PKB	7.900.000.000.000	7.850.000.000.000	8.100.000.000.000	8.400.000.000.000	8.750.000.000.000	9.100.000.000.000
2	BBN-KB	5.000.000.000.000	5.525.000.000.000	5.800.000.000.000	6.100.000.000.000	6.450.000.000.000	6.800.000.000.000
3	PBB-KB	1.100.000.000.000	1.250.000.000.000	2.800.000.000.000	3.000.000.000.000	3.200.000.000.000	3.600.000.000.000
4	PAT	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
5	Pajak Hotel	1.630.000.000.000	1.700.000.000.000	1.900.000.000.000	2.150.000.000.000	2.400.000.000.000	2.800.000.000.000
6	Pajak Restoran	2.800.000.000.000	3.100.000.000.000	3.400.000.000.000	3.800.000.000.000	4.200.000.000.000	5.000.000.000.000
7	Pajak Hiburan	750.000.000.000	900.000.000.000	1.050.000.000.000	1.200.000.000.000	1.350.000.000.000	1.600.000.000.000
8	Pajak Reklame	850.000.000.000	1.050.000.000.000	1.150.000.000.000	1.200.000.000.000	1.250.000.000.000	1.500.000.000.000
9	PPJ	900.000.000.000	875.000.000.000	950.000.000.000	1.000.000.000.000	1.050.000.000.000	1.200.000.000.000
10	Pajak Parkir	600.000.000.000	750.000.000.000	800.000.000.000	850.000.000.000	900.000.000.000	1.000.000.000.000
11	BPHTB	5.300.000.000.000	5.150.000.000.000	5.900.000.000.000	6.700.000.000.000	7.500.000.000.000	9.300.000.000.000
12	PBB-P2	7.700.000.000.000	7.250.000.000.000	7.500.000.000.000	7.800.000.000.000	8.100.000.000.000	8.600.000.000.000
13	P. Rokok	600.000.000.000	625.000.000.000	650.000.000.000	700.000.000.000	750.000.000.000	800.000.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>35.230.000.000.000</b>	<b>36.125.000.000.000</b>	<b>40.100.000.000.000</b>	<b>43.000.000.000.000</b>	<b>46.000.000.000.000</b>	<b>51.400.000.000.000</b>

# PROGRAM PRIORITAS BPRD TAHUN 2017



OPTIMALISASI PENERIMAAN MELALUI *FISCAL CADASTER*

*LAW ENFORCEMENT* KEPADA WAJIB PAJAK

INTEGRASI PERIJINAN USAHA DALAM BENTUK *TAX CLEARANCE* /  
KETERKAITAN FISKAL SECARA MENYELURUH KEPADA WAJIB PAJAK

PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SECARA  
OPTIMAL

# PROGRAM UNGGULAN BPRD TAHUN 2017

2016	2017	
Tahun Pembinaan	Tahun Pencegahan Semester I	Tahun Penindakan Semester II
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB</li> <li>• Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2</li> <li>• Penyampaian Surat BDU</li> <li>• Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Tidak menerbitkan SPPT PBB-P2 bagi Wajib Pajak yang menunggak</li> <li>• Setoran Masa Minimal</li> <li>• Pendataan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razia Gabungan Kendaraan Bermotor (pembayaran PKB di tempat terhadap Kbm BDU)</li> <li>• Pemasangan Plang atau Stiker terhadap penunggak pajak</li> <li>• Integrasi perizinan dan tax clearance (lunas pajak) dengan SKPD terkait dalam kegiatan pemungutan pajak daerah</li> <li>• Bekerjasama dengan <b>KPK RI</b> dalam melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam kegiatan pemungutan dan optimalisasi pajak daerah (penandatanganan Aksi Bersama pada tanggal 3 Februari 2017)</li> <li>• Bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam penyusunan monografi wilayah (Fiscal Cadaster)</li> <li>• Sosialisasi kepada WP</li> <li>• Sosialisasi kepada aparatur pegawai pajak tentang gratifikasi dan KKN</li> <li>• Pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap aparatur pegawai pajak</li> <li>• Pembinaan terkait integritas pegawai pajak</li> <li>• Pajak Reklame dikenakan saat tertayangnya visual reklame</li> <li>• Kebijakan Pemerintah Daerah (Pergub) berupa Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak reklame jenis LED → pengurangan sebesar 30% dari NSR/NKR yang telah ditetapkan sebesar 70%</li> </ul> <p>Perubahan Perda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•BBN-KB → tarif BBN I yang semula sebesar 10% menjadi 20%</li> <li>•Pajak Parkir → tarif yang semula 20% menjadi 30%</li> <li>•PPJ → untuk penggunaan listrik oleh usaha/commercial yang semula 3% menjadi 8%</li> <li>•PBB-P2 → melakukan penyesuaian NJOP mendekati harga pasar yang wajar → Mengubah saat terutang PBB P2 tidak hanya saat kondisi objek pada tanggal 1 januari, agar proses pemecahan sppt pbb dan proses penyesuaian data objek dan penerbitan SPPT PBB bisa dilakukan pada tahun berjalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razia Gabungan Kendaraan Bermotor (sita Kbm BDU)</li> <li>• Pemeriksaan Lengkap Pajak Daerah</li> <li>• Pencabutan Izin</li> <li>• Penyegehan</li> <li>• Pemanggilan/Penagihan Pajak Daerah melalui kerjasama dengan <b>KPK RI</b></li> <li>• Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sesuai UU 19/2000 dengan dukungan dan supervisi dari <b>KPK RI</b></li> <li>• Penyelesaian sengketa pajak terhadap objek-objek tertentu (kriminalisasi perpajakan) melalui pendampingan oleh <b>KPK RI</b></li> </ul>